

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, salah satu sektor ekonomi yang berkembang pesat yaitu sektor usaha. Persaingan dalam sektor usaha ini juga tidak dapat dipungkiri, utamanya persaingan oleh pelaku UMKM. Kehadiran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dianggap mampu dalam meratakan perekonomian di Indonesia hingga ke berbagai pelosok (Wismanjaya & Werastuti, 2022). Menurut penelitian Agustini & Purnamawati (2022) Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah suatu jenis kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan, dapat memberikan pelayanan ekonomi yang luas, berperan dalam proses pemerataan, peningkatan pendapatan bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan aktif dalam peningkatan stabilitas nasional. Secara singkat, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan suatu jenis aktivitas wirausaha, dikelola baik perorangan atau badan usaha kecil (Masdiantini et al., 2024). Pengembangan UMKM tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah (Sinarwati et al., 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang dimaksud dengan UMKM adalah usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tertentu yaitu: (1) Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 50.000.000, dan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp 300.000.000, (2) Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 sampai dengan Rp

500.000.000, dan penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.000, (3) Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih antara Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000, dan penjualan bersih tahunan antara Rp 2.500.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000.000.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng Berdasarkan**  
**Klasifikasi Usaha, Tahun 2021 – 2024**

Klasifikasi Usaha	Data UMKM				Jumlah
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Usaha Mikro	7.007	12.513	23.589	32.821	75.930
Usaha Kecil	3.662	4.835	5.789	6.115	20.401
Usaha Menengah	225	342	387	430	1.384
<b>Total</b>	<b>10.894</b>	<b>17.690</b>	<b>29.765</b>	<b>39.366</b>	<b>97.715</b>

(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buleleng, 2025)

Peningkatan jumlah pelaku usaha ini membuka peluang ekonomi yang luas, namun sekaligus memperlihatkan tantangan struktural terkait tata kelola usaha, salah satunya adalah praktik pencatatan dan pelaporan keuangan.

Sejak diterbitkan pada tahun 2016 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2018, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ditujukan untuk mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM di Kabupaten Buleleng masih rendah. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM oleh pelaku UMKM masih bersifat minim dan belum menyeluruh. Salah satu peneliti yang dilakukan oleh Darmasari dan Wahyuni

(2020) menjelaskan bahwa pelaku UMKM belum siap menerapkan SAK EMKM karena pemahaman akuntansi dan kesiapan pelaku masih rendah. Sebagian besar UMKM di Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya memahami format laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM karena keterbatasan sumber daya manusia dan literasi keuangan. Fenomena ini terjadi karena minimnya pendampingan langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM, sehingga pelaku usaha belum merasa memiliki kebutuhan untuk menyusun laporan sesuai standar. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Oktavia & Masdiantini (2023) menunjukkan bahwa meskipun banyak UMKM di Kabupaten Buleleng menyatakan mengetahui SAK EMKM, namun pelaksanaannya masih belum konsisten. Beberapa usaha belum menyusun laporan keuangan sesuai format SAK EMKM, dan masih ada yang belum menyadari kewajiban komponen seperti CaLK atau laporan posisi keuangan formal. Penelitian sebelumnya oleh Fresiliasari & Utami (2025) terhadap UMKM Batik Lea Collection menunjukkan bahwa walaupun pelaku usaha telah mengenal SAK EMKM, pelaksanaannya dalam penyusunan laporan keuangan masih belum menyeluruh, khususnya dalam komponen CaLK dan pelaporan yang konsisten.

Berdasarkan hasil diskusi dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, hingga saat ini belum tersedia data resmi mengenai jumlah UMKM yang telah menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM masih belum optimal dan belum terpantau secara sistematis oleh instansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur tingkat penerapan SAK EMKM melalui instrumen kuesioner pelaku UMKM.

Literasi keuangan merujuk pada tingkat pemahaman dan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan usaha, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, hingga pemanfaatan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Literasi keuangan yang baik akan membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan secara lebih terstruktur dan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, fenomena yang terjadi di Kabupaten Buleleng, literasi keuangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya UMKM yang melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, bahkan hanya mengandalkan catatan kas masuk dan kas keluar tanpa sistem pembukuan yang memadai.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Buleleng (2024), lebih dari 60% pelaku UMKM masih melakukan pencatatan keuangan secara manual di buku tulis tanpa menggunakan sistem pembukuan yang terstandar. Kondisi ini mencerminkan rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM dalam memahami pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Erawati & Setyaningrum (2021) menyatakan bahwa UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan dan pemahaman akuntansi yang rendah cenderung belum mampu mengelola keuangan usaha secara optimal, sehingga pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan kurang lengkap dan tidak terstruktur.

Penelitian Dewi & Sari (2021) juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu penyebab utama UMKM belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Kondisi ini menyebabkan pelaku

usaha mengalami kesulitan dalam memahami posisi keuangan dan kinerja usahanya. Salah satu UMKM di Kecamatan Sawan, pencatatan keuangan yang dilakukan masih bersifat sederhana yaitu catatan berupa kas masuk dan kas keluar. Hasil penelitian Sugita & Sinarwati (2022) juga menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan menyebabkan pelaku UMKM kurang memahami fungsi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga pencatatan keuangan belum dilakukan secara optimal dan belum mengarah pada penerapan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian serupa oleh Puspartini & Sulindawati (2024) menemukan bahwa banyak UMKM di Kecamatan Buleleng memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah, sehingga pelaku usaha cenderung hanya melakukan pencatatan transaksi dasar dan belum mampu menyusunnya menjadi laporan laba rugi, neraca, maupun catatan atas laporan keuangan (CaLK). Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi keuangan yang rendah masih menjadi permasalahan utama bagi pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng dan berimplikasi pada rendahnya tingkat penerapan SAK EMKM.

Kualitas modal usaha di Kabupaten Buleleng menunjukkan fenomena bahwa modal sangat mempengaruhi kemampuan UMKM untuk laporan keuangan yang baik. Fenomena yang terjadi di lapangan, banyak UMKM masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal, sehingga kualitas modal usaha yang dimiliki rendah. Hal ini berdampak dalam kapasitas berinvestasi pada sistem pencatatan, aplikasi atau SDM administrasi menjadi terbatas. Menurut data Bali Satu Data (2023), Kabupaten Buleleng didominasi oleh usaha mikro. Jumlah UMKM kategori mikro sangat besar dibanding kategori kecil/menengah, sehingga karakter modal pelaku usaha cenderung terbatas pada modal kerja harian.

Berdasarkan penelitian oleh Oktayani *et al* (2024), pelaku UMKM di Kecamatan Buleleng dan Gerokgak masih kesulitan mendapatkan pinjaman perbankan karena tidak memiliki laporan keuangan yang kredibel sebagai syarat administratif. Akibatnya, banyak usaha berjalan dengan modal terbatas dan sulit berkembang. Fenomena ini menunjukkan keterkaitan antara akses keuangan, pemanfaatan modal usaha, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk UMKM. Fenomena serupa pada pelaku UMKM Dapur Bali Mula yang terletak di Kecamatan Tejakula yang mengandalkan modal pribadi dari keuntungan usaha sebelumnya tanpa adanya tambahan modal eksternal. Menurut penelitian oleh Putra & Sulindawati (2023) menyatakan bahwa modal pribadi yang terbatas membuat pelaku usaha tidak mampu berinvestasi dalam peningkatan kapasitas produksi atau inovasi produk. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa rendahnya kualitas modal usaha di Kabupaten Buleleng tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan dana, tetapi juga rendahnya kemampuan manajerial dalam mengelola modal secara efisien.

Para pelaku UMKM mesti memahami penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas tentu harus dibarengi dengan pemahaman akuntansi. Di Kabupaten Buleleng, rendahnya literasi akuntansi menjadi kendala signifikan dalam penyusunan laporan berbasis SAK EMKM. Penelitian oleh Oktavia & Masdiantini (2023) menemukan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM di Kabupaten Buleleng, artinya UMKM dengan pemahaman akuntansi yang lebih baik lebih mampu mengadopsi standar pelaporan keuangan formal. Namun, rendahnya pemahaman akuntansi menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai standar. Penelitian sebelumnya mengenai pemahaman

akuntansi yang dilakukan oleh Suantha (2025) menyatakan bahwa praktik pencatatan yang dilakukan di Kabupaten Buleleng masih sangat sederhana, dan tantangan utamanya adalah minimnya pemahaman terkait akuntansi, belum adanya sistem pencatatan yang teratur, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Fibrina & Andriani (2025) juga menyatakan hal yang sama bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng saat ini hanya mencatat transaksi secara sederhana, seperti penerimaan dan pengeluaran kas, tanpa menyusun laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Kebiasaan ini umumnya terjadi karena keterbatasan pemahaman akan pentingnya akuntansi serta minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pencatatan keuangan. Akibatnya, mereka kesulitan melihat kondisi keuangan usaha secara menyeluruh atau bahkan memperoleh pendanaan dari lembaga keuangan yang membutuhkan laporan keuangan secara terstruktur dan akuntabel. Hasil observasi pada pelaku usaha mikro yang terletak di Kecamatan Kubutambahan Desa Tamblang yaitu Warung Cening, menunjukkan bahwa pencatatan keuangan masih sebatas mencatat uang masuk dan keluar. Minimnya pemahaman akuntansi juga menyebabkan banyak pelaku usaha tidak dapat memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Penelitian oleh Dewi & Sari (2021) menunjukkan bahwa meskipun ada program sosialisasi SAK EMKM, jangkauan dan intensitasnya belum cukup untuk menghasilkan pemahaman mendalam sehingga penggunaan praktik akuntansi berbasis standar masih lemah.

Dalam studi Koperasi se-Kabupaten Buleleng oleh Meliani & Werastuti (2022) menemukan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian oleh Krisnayanti &

Masdiantini (2025) juga menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi termasuk ke dalam variabel kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Pelaku usaha dengan pemahaman akuntansi lebih baik memiliki laporan keuangan yang lebih lengkap dan lebih dapat dipercaya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Prihastuti & Sukri (2024) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. Pelaku UMKM yang memahami dasar-dasar akuntansi cenderung lebih mampu menyusun laporan keuangan lebih rapi dan sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, kendala utama yang masih banyak dihadapi adalah rendahnya tingkat pemahaman akuntansi akibat terbatasnya pendidikan formal di bidang ini. Alhasil, meskipun sudah ada pelatihan atau sosialisasi, banyak pelaku usaha yang masih kesulitan menerapkannya secara praktis dalam aktivitas harian mereka. Semakin tinggi pemahaman akuntansi, semakin besar peluang UMKM menerapkan SAK EMKM dengan baik.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan kepada pemilik Usaha Kecil Toko Lami yang terletak di Kecamatan Sawan mendapatkan hasil bahwa pemilik usaha belum mengetahui pemahaman yang memadai terkait pentingnya penyusunan laporan keuangan secara sistematis dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemilik usaha hanya membuat pencatatan laporan keuangan secara sederhana yaitu catatan berupa kas masuk dan kas keluar. Pelaku usaha Toko Lami mengatakan bahwa pencatatan keuangan tidak dilakukan secara rutin, melainkan hanya ketika terdapat transaksi yang cukup besar. Dari sisi permodalan, pelaku usaha menyampaikan bahwa modal usaha yang digunakan masih berasal dari modal pribadi. Ketika ditanyakan mengenai pengalaman

mengikuti pelatihan atau pendidikan tentang akuntansi usaha, pemilik usaha menyatakan bahwa ia belum pernah mengikuti pelatihan formal terkait penyusunan laporan keuangan atau SAK EMKM. Pelatihan ini jarang dilakukan di wilayah Kecamatan Sawan dan belum menjangkau usaha kecil yang lokasinya tersebar di desa-desa. Observasi selanjutnya yang dilakukan kepada pemilik Usaha Mikro Dodol Khas Singaraja (Komang Sudarmi) yang terletak di Kecamatan Kubutambahan mendapatkan hasil terkait pencatatan keuangan bahwa pemilik usaha hanya mencatat kas masuk dan keluar secara manual karena tidak terbiasa menggunakan pembukuan formal, sebatas mencatat hasil penjualan harian dan pembelian bahan baku. Pemilik usaha mengatakan pencatatan dilakukan secara tidak rutin dan sering tertunda karena padatnya aktivitas produksi. Dapat disimpulkan bahwa kedua pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih menghadapi kendala dalam hal pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kedua pelaku usaha hanya melakukan pencatatan sederhana berupa arus kas masuk dan kas keluar tanpa menyusun laporan keuangan secara lengkap. Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan bahwa sumber modal usaha masih didominasi oleh modal pribadi. Hasil observasi di kedua wilayah tersebut menggambarkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, masih terdapat celah (*Research GAP*) yang perlu diteliti lebih lanjut terkait penerapan SAK EMKM di Kabupaten Buleleng. Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Prajanto & Septriana (2018), Mubiroh & Ruscitasari

(2020), dan Dewi & Sari (2021), menempatkan SAK EMKM sebagai variabel independen yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian yang menguji pengaruh literasi keuangan, kualitas modal usaha, dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM secara simultan masih terbatas, khususnya pada konteks UMKM di Kabupaten Buleleng. Kondisi ekonomi daerah yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa dengan karakteristik usaha mikro menunjukkan bahwa tingkat penggunaan SAK EMKM di Kabupaten Buleleng masih rendah, sehingga diperlukan penelitian yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat penerapannya.

Penelitian ini menggunakan *Resource-Based Theory* (RBT) sebagai landasan teori. *Resource-Based Theory* (RBT) menekankan pentingnya sumber daya internal seperti literasi keuangan, modal finansial, kompetensi SDM, dan pengetahuan akuntansi sebagai aset strategis yang mempengaruhi kemampuan UMKM dalam menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik, termasuk penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Motivasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Penerapan SAK EMKM penting untuk diteliti karena dapat mendorong keberlanjutan usaha, baik usaha kecil, mikro maupun menengah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM dalam menyusun kebijakan serta program pendampingan terkait pelaporan keuangan berbasis SAK EMKM. Penelitian ini juga didorong oleh literasi keuangan

UMKM di Kabupaten Buleleng yang berpotensi menghambat kemampuan pelaku usaha dalam memahami, menyusun, dan menerapkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM secara konsisten.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Puspartini & Sulindawati (2024) dalam penelitian “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, Skala Usaha dan Lama Usaha terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kecamatan Kubu” dilakukan pada 237 responden dengan pendekatan kuantitatif dan teknik purposive sampling. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, dan skala usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, lama usaha juga menjadi faktor pendukung karena pengalaman jangka panjang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pencatatan keuangan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pelaku UMKM yang tercermin, khususnya dalam pemahaman akuntansi, pendidikan, pengalaman usaha, dan kapasitas usaha, berperan penting dalam menentukan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan UMKM. Penelitian serupa dilakukan oleh Putra & Sulindawati (2023) menemukan bahwa modal usaha berpengaruh positif terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Buleleng. Peneliti menyatakan bahwa modal usaha dan penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keberhasilan usaha. Namun, efektivitas pemanfaatan modal usaha sangat bergantung pada tingkat literasi keuangan pelaku UMKM dalam mengelola, mengalokasikan, dan mengevaluasi penggunaan modal tersebut. Oleh karena itu, literasi keuangan tidak hanya berperan dalam pengelolaan modal usaha, tetapi juga mendukung penerapan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang lebih baik. Penelitian ini mendukung

argumen bahwa kualitas modal usaha dan literasi keuangan yang memadai berkaitan erat dengan keberlanjutan usaha serta kemampuan UMKM dalam menerapkan standar pelaporan keuangan seperti SAK EMKM.

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Krisnayanti & Masdiantini (2025) yang berjudul “Pengaruh Kualitas SDM, Pemahaman Akuntansi, Ukuran Usaha, dan Sosialisasi SAK EMKM terhadap kualitas Laporan keuangan (Studi pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnayanti & Masdiantini (2025) terletak pada variabel yang digunakan. Peneliti terdahulu lebih menekankan pada kualitas sumber daya manusia, ukuran usaha, dan sosialisasi, sementara penelitian ini memperluas cakupan dengan menambahkan literasi keuangan, kualitas modal usaha dan tingkat pemahaman akuntansi sebagai variabel yang dapat mempengaruhi penerapan SAK EMKM. Pemilihan UMKM di Kabupaten Buleleng sebagai objek penelitian dinilai relevan karena hingga kini masih banyak pelaku usaha yang belum secara konsisten menerapkan standar akuntansi, sehingga penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berpengaruh.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Masdiantini (2023) menggunakan objek UMKM di Kabupaten Buleleng dengan variabel independen pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan tingkat pendidikan pelaku usaha. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel independen yaitu literasi keuangan dan kualitas modal usaha. Alasan ditambahkannya kedua variabel ini untuk mengembangkan penelitian dari Oktavia & Masdiantini (2023) yang dinilai penting dimana pelaku usaha dengan modal yang cukup akan lebih mudah berinvestasi

dalam sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain modal usaha, literasi keuangan pelaku UMKM berperan penting dalam menentukan kemampuan usaha untuk mengelola keuangan dan mengadopsi sistem pencatatan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Peneliti menemukan banyak diantaranya masih menghadapi kendala dalam hal rendahnya literasi keuangan, keterbatasan modal, dan minimnya pemahaman akuntansi, sehingga penerapan SAK EMKM belum dilakukan secara optimal. Batasan masalah berkaitan dengan penelitian ini adalah mengenai pengaruh literasi keuangan, kualitas modal usaha, dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan pada fenomena dan juga penelitian terdahulu, maka peneliti mengangkat judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Kualitas Modal Usaha, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM pada Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka berikut identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Literasi keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah, yang tercermin dari praktik pencatatan keuangan yang masih sederhana dan belum terstruktur. Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya pengelolaan keuangan usaha secara sistematis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan penerapan SAK EMKM.

2. Kualitas modal usaha pelaku UMKM sebagian besar masih bergantung pada modal pribadi tanpa adanya akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kapasitas UMKM untuk meningkatkan sistem administrasi dan pelaporan keuangan.
3. Tingkat pemahaman akuntansi pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih rendah, sehingga banyak pelaku usaha belum mampu menyusun laporan keuangan yang baik dan benar. Kurangnya edukasi dan pendampingan menyebabkan pelaku UMKM belum memahami konsep dasar akuntansi.
4. Rendahnya penerapan SAK EMKM di Kabupaten Buleleng menunjukkan masih minimnya pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Kabupaten Buleleng. Artinya, hasil yang diperoleh lebih menekankan kondisi UMKM di daerah ini dan mungkin berbeda jika dibandingkan dengan wilayah lain. Variabel independen yang diteliti mencakup literasi keuangan, kualitas modal usaha, dan tingkat pemahaman akuntansi. Dari ketiga variabel tersebut, tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan SAK EMKM. Variabel dependen yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan SAK EMKM, khususnya terkait penyusunan laporan keuangan sederhana sesuai

standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penelitian ini hanya melibatkan UMKM yang masih aktif di Kabupaten Buleleng dan data yang digunakan terbatas pada periode diambil selama penelitian berlangsung. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Buleleng.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kualitas modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas modal usaha terhadap penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.

3. Untuk menguji pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada pelaku UMKM. Hasil penelitian memperkuat teori bahwa faktor internal seperti kualitas modal usaha, dan tingkat pemahaman akuntansi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan standar akuntansi pada entitas mikro, kecil dan menengah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang akuntansi keuangan, manajemen usaha mikro, serta studi literasi keuangan dan akuntansi di tingkat lokal atau daerah, khususnya di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian akademik lanjutan yang mengkaji peran variabel internal dalam peningkatan tata kelola dan transparansi pelaporan keuangan UMKM.

### 2) Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya melakukan pencatatan keuangan secara rutin dan sistematis, mengelola modal usaha dengan efisien, serta memahami prinsip dasar akuntansi sebagai upaya mendukung

penerapan SAK EMKM. Dengan penerapan pembukuan yang baik dan terstandar, UMKM diharapkan dapat mengelola keuangannya secara lebih terstruktur, memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi usaha, serta dapat meningkatkan peluang mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dan praktik terkait kualitas modal usaha, tingkat pemahaman akuntansi, serta penerapan SAK EMKM pada pelaku UMKM. Selain itu, proses penelitian ini juga melatih peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antarvariabel. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan analitis, berpikir kritis, serta kemampuan dalam menyusun rekomendasi kebijakan berbasis analisis empiris yang relevan dengan kondisi UMKM di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan strategis maupun program pendampingan UMKM, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan literasi keuangan dan kemampuan akuntansi. Melalui hasil penelitian ini, pemerintah dapat merancang pelatihan dan sosialisasi SAK EMKM yang lebih tepat sasaran, sehingga dapat

membantu meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap standar akuntansi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng telah menerapkan SAK EMKM dalam kegiatan usahanya. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan sebagai dasar pertimbangan dalam mengukur tingkat keandalan laporan keuangan UMKM dan meningkatkan kepercayaan dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM.

